

Mahfud MD Bersama Sejumlah Purnawirawan Bahas Ancaman Radikalisme hingga HIP

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Jakarta-Sejumlah purnawirawan TNI menyambangi Menko Polhukam Mahfud Md. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, mulai ancaman terhadap ideologi negara, radikalisme, hingga Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU-HIP)

Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2020). Purnawirawan TNI yang hadir di antaranya Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, dan Letjen TNI (Purn) Bambang Dharmono.

“Belakangan muncul berbagai ancaman terhadap ideologi negara, fenomena liberalisme, radikalisme, dan lain sebagainya yang perlu diantisipasi dengan sangat baik oleh pemerintah,” kata juru bicara purnawirawan TNI, Saiful Sulun, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat, (12/6).

Mantan Wakil Ketua MPR RI ini juga menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh kepada pemerintah. Dia menilai selama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi)

sudah bekerja dengan tulus untuk masyarakat.

“Kami mengapresiasi dan mendukung pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, yang dengan tulus dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat,” ujar Saiful.

Mewakili purnawirawan yang sebagian besar merupakan anggota Legiun Veteran RI ini, Saiful berharap mereka dapat bertemu dengan Presiden Jokowi. Meski belum berkesempatan untuk bertemu, mereka memaklumi.

“Kami dulu sering bertemu dan berdialog dengan Bapak Presiden. Tapi kami paham betul beliau sekarang sangat sibuk, urusan COVID dan lain-lain, persoalan bangsa, padahal kami rindu untuk bertemu,” ucapnya.

Selain itu, para purnawirawan ini menanyakan tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP). Mahfud menyampaikan bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif DPR.

Mahfud menjelaskan pemerintah juga memberikan perhatian besar dan tengah melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dia menyebut pemerintah memiliki sikap yang sama dengan para purnawirawan, yakni tidak akan ada tempat untuk ideologi selain Pancasila.

“Sikap pemerintah sama dengan Bapak-bapak sekalian bahwa Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komunisme, marxisme, leninisme, dan paham-paham radikal,” jelas Mahfud.